



## Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo

Ibel Stefani Putri<sup>1\*</sup>, Yacob Noho Nani<sup>2</sup>, Romy Tantu<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

\*Penulis Korespondensi : [ibelstefani22@gmail.com](mailto:ibelstefani22@gmail.com)

**Abstract.** *This aims to examine and analyze the implementation of the cash transfer assistance policy in efforts to alleviate poverty in Moodu Urban Village, Kota Timur Subdistrict, Gorontalo City. This research employed a qualitative method. The findings indicate that the effectiveness of the policy implementation has not yet been optimal due to several influencing factors: (1) policy standards and target groups have not been fully accurate; (2) available resources, both in terms of the number of implementing personnel and supporting infrastructure, remain very limited; (3) inter-organizational communication and activity reinforcement are less effective; (4) the characteristics of implementing agents reveal that some officers do not yet fully understand the procedures and mechanisms for distributing cash transfer assistance; (5) the economic, social, and political environment of the Moodu community, which is predominantly engaged in the informal sector, presents additional challenges in ensuring program effectiveness; and (6) the attitudes of implementers, in the absence of continuous guidance and periodic supervision, increase the potential for administrative errors and inaccurate distribution.*

**Keywords:** *Cash Transfer; Moodu Sub-district; Policy Implementation; Poverty Alleviation; Social Welfare.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana kebijakan bantuan tunai langsung diimplementasikan di Desa Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam upaya mengurangi kemiskinan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum seefektif yang diharapkan karena sejumlah masalah, antara lain: 1) Standar dan Tujuan Kebijakan belum sepenuhnya sesuai, 2) Sumber daya yang tersedia masih sangat terbatas, baik dari segi staf pelaksana maupun infrastruktur pendukung, 3) Komunikasi antar organisasi dan inisiatif penguatan masih kurang berhasil, 4) Karakteristik Agen Pelaksana menunjukkan bahwa beberapa petugas kepolisian masih kurang memahami protokol dan sistem pendistribusian BLT secara menyeluruh, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Desa Moodu yang sebagian besar bekerja di sektor informal menambah kesulitan dalam menjamin efektivitas program. 6) Sikap Pelaksana: Distribusi yang tidak akurat dan kesalahan administrasi masih dapat terjadi jika tidak ada pengawasan dan arahan yang konsisten.

**Kata kunci:** Alleviasi Kemiskinan; Distrik Moodu; Implementasi Kebijakan; Transfer Tunai; Kesejahteraan Sosial.

### 1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah jenis kemiskinan individu atau kelompok yang menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri agar dapat memiliki kehidupan yang bermakna. Saat ini, kemiskinan merupakan masalah serius yang terus ditangani pemerintah Indonesia karena tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Akibatnya, semakin banyak kemiskinan, semakin tinggi pula angka kemiskinan, (Oktaviana B. Kaku, Juriko Abdussamad, 2023).

Salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi adalah Gorontalo. Meskipun Gorontalo memainkan peran penting sebagai pusat ekonomi provinsi, kemiskinan masih menjadi masalah utama. Mayoritas penduduk miskin di kota ini bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan pekerja harian, di mana penghasilan mereka

tidak dapat diprediksi dan tidak ada jaminan kesejahteraan. Salah satu faktor utama yang membuat individu terjebak dalam lingkaran kemiskinan adalah kurangnya kesempatan kerja resmi dan jangka panjang.

Sebagai respons, Dewan Kota Gorontalo telah menerapkan strategi bantuan tunai langsung, khususnya di Desa Modu, Kecamatan Kota Timur. Program bantuan keuangan langsung ini, yang telah beroperasi selama lebih dari lima tahun, dimulai pada tahun 2020 dan akan berlangsung hingga Januari 2025.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh penulis, terdapat sekitar 954 orang yang tinggal di Kecamatan Modu, Kabupaten Kota Timur, Kota Gorontalo pada tahun 2024, dengan 432 laki-laki dan 522 perempuan. Sebanyak 340 warga kecamatan ini terdaftar sebagai penerima bantuan tunai langsung, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka yang paling membutuhkan, sebagai bagian dari upaya pengurangan kemiskinan. Statistik ini menunjukkan pentingnya dukungan sosial dalam menurunkan kemiskinan di daerah tersebut.

**Tabel 1.** Data Penerima Bantuan Langsung Tunai.

No	Tahun	Data Penerima BLT
1.	2020	268 Jiwa
2.	2021	269 Jiwa
3.	2022	145 Jiwa
4.	2023	346 Jiwa
5.	2024	340 Jiwa

*Sumber Data: Kesejahteraan Sosial Kelurahan Moodu, 2024*

Menurut statistik tabel, jumlah penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) di Desa Moodu bervariasi setiap tahun seiring dengan perubahan tingkat kemiskinan. Jumlah penerima relatif konstan pada tahun 2020 dan 2021, yaitu 268 dan 269 orang. Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan tajam menjadi 145 orang. Hal ini disebabkan oleh modifikasi pada basis data penerima, perubahan kebijakan pemerintah terkait persyaratan bagi penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT), atau peningkatan kondisi keuangan warga tertentu, yang membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Kemudian, pada tahun 2023, jumlah penerima bantuan melonjak menjadi 346 sebagai akibat dari dampak ekonomi variabel eksternal seperti inflasi pandemi atau bencana alam yang meningkatkan jumlah orang yang membutuhkan bantuan. Jumlah penerima bantuan sedikit menurun menjadi 340 pada tahun 2024, mungkin sebagai hasil dari evaluasi ulang dan penyaringan ulang para penerima manfaat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Administrasi Publik**

Ali, dalam (Pasolong, 2019) menyatakan bahwa administrasi adalah kerja sama manusia berdasarkan pertimbangan logis untuk mencapai tujuan bersama sebuah konsep yang hanya ada dalam pikiran. Hal ini karena tidak semua upaya manusia dianggap sebagai administratif. Jika diakui bahwa kerja sama manusia dalam mencapai tujuan organisasi melalui tindakan dengan pertimbangan yang masuk akal terkait erat dengan perspektif saat ini tentang administrasi.

### **Konsep Kebijakan Publik**

Serangkaian pilihan yang dibuat oleh aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu sebagai respons terhadap masyarakat dikenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik, menurut William N. Dunn dalam (Pasolong, 2019), adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang dibuat oleh organisasi atau otoritas di bidang-bidang yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah, termasuk kejahatan, daerah perkotaan, kesejahteraan publik, pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, dan pendidikan.

### **Konsep Implementasi**

Proses pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu kebijakan melalui tindakan individu atau kelompok disebut implementasi. Hinggis dalam (Tahir, 2020), mendefinisikan implementasi sebagai kumpulan beberapa tindakan di mana sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan strategis.

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Proses penerapan tujuan kebijakan ke dalam praktik dikenal sebagai implementasi kebijakan. Untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan tugas operasional, hal ini melibatkan sejumlah tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor, baik publik maupun swasta. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Nani et al., 2024), terdapat enam indikator penting untuk melaksanakan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan dikenal sebagai standar dan sasaran kebijakan. Efisiensi implementasi akan bergantung pada seberapa jelas dan konsisten standar dan sasaran tersebut ditetapkan. Implementasi dapat menghadapi tantangan jika standar dan sasaran tidak jelas karena pelaksana tidak akan memiliki arahan yang jelas.
- b. Sumber daya: Anggaran, personel, fasilitas, informasi, dan sumber daya lainnya dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan. Meskipun ketersediaan sumber daya yang memadai dapat meningkatkan efektivitas implementasi, kekurangan sumber daya dapat menghambat implementasi kebijakan.

- c. Komunikasi antar organisasi dan inisiatif penguatan: Kolaborasi yang efektif antara berbagai organisasi atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting. Komunikasi yang baik akan menjamin bahwa pelaksana memahami kebijakan dan bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan.
- d. Ciri-ciri lembaga pelaksana, seperti budaya organisasi, struktur birokrasi, serta keterampilan dan dedikasi para pejabat pelaksana. Implementasi kebijakan yang efektif lebih mungkin terjadi di organisasi dengan tenaga kerja yang kompeten dan terorganisir dengan baik.
- e. Iklim politik, sosial, dan ekonomi dapat memengaruhi bagaimana kebijakan dilaksanakan. Misalnya, pelaksanaan suatu kebijakan dapat mengalami masalah jika masyarakat menentanginya atau jika terjadi perubahan politik besar.

### **Konsep Bantuan Langsung Tunai**

Pemerintah menawarkan bantuan tunai sebagai bagian dari program bantuan sosial yang disebut Bantuan Tunai Langsung (BLT). Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah.

Dalam bukunya "Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia," (Suharto, 2009), mendefinisikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) sebagai jaring pengaman sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu sebagai respons terhadap dampak negatif langsung dari suatu kebijakan tertentu.

### **Konsep Pengentasan Kemiskinan**

Upaya sistematis untuk mengurangi dan memberantas situasi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan medis dikenal sebagai pengentasan kemiskinan. Gagasan ini mengambil pendekatan multifaset, yang berfokus pada unsur-unsur sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi kemiskinan di samping unsur-unsur ekonomi. Tujuan utamanya adalah membangun masyarakat yang lebih kaya, adil, dan berdaya.

## **3. METODE PENELITIAN**

Bagian ini mencakup desain penelitian, populasi/sampel, metode dan alat pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Cukup merujuk pada rumus yang dikutip (misalnya, uji F, uji t, dll.) daripada memberikan deskripsi rinci tentang pendekatan umum. Deskripsi rinci tentang pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak

diperlukan; temuan pengujian dan interpretasinya sudah memadai. Kalimat digunakan untuk menjelaskan simbol dalam model.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara langsung bagaimana program Bantuan Tunai Langsung (BLT) diimplementasikan di Desa Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan, khususnya di daerah berpenghasilan rendah yang secara langsung terdampak oleh tekanan keuangan. Diharapkan BLT akan membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh kebutuhan pokok termasuk makanan, perawatan medis, dan pendidikan. Namun, tujuan kebijakan serta bagaimana kebijakan tersebut sebenarnya diimplementasikan memengaruhi seberapa efektifnya program tersebut.

Tiga teknik utama digunakan dalam proses pengumpulan data: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik utama untuk mengumpulkan data dari mereka yang terlibat langsung baik pelaksana maupun penerima manfaat adalah melalui wawancara. Untuk mendokumentasikan keadaan sebenarnya di tempat kebijakan tersebut diterapkan, dilakukan observasi. Data yang dikumpulkan didukung dan diperkuat oleh dokumentasi, termasuk salinan data penerima, laporan pelaksanaan bantuan, dan foto-foto kegiatan distribusi. Ketiga pendekatan ini bekerja sama dengan baik untuk memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana program Bantuan Tunai Langsung (BLT) diimplementasikan di Desa Moodu.

Para peneliti menggunakan metode berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, yang mengidentifikasi enam indikator penting, untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, standar dan tujuan kebijakan, serta sikap pelaksana kebijakan adalah enam indikator tersebut. Setiap indikator mewakili komponen penting dari keberhasilan implementasi. Para peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana Bantuan Tunai Langsung (BLT) telah diimplementasikan sesuai dengan rancangan pembuat kebijakan dengan memeriksa kebijakan menggunakan enam metrik ini.

##### **Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dalam Penegentasan Kemiskinan Di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo**

Berikut adalah hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga penerima bantuan di Kelurahan Moodu:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Data yang valid dan sering diperbarui seharusnya menjadi dasar untuk menetapkan standar dan tujuan implementasi Bantuan Tunai Langsung (Direct Cash Assistance/BLT). Namun, karena kekurangan dalam pengumpulan data, observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerima bantuan masih belum sesuai dengan definisi kemiskinan. Sebagian besar data belum sepenuhnya divalidasi, yang menyebabkan penargetan bantuan yang salah. Sementara mereka yang benar-benar membutuhkan ditolak haknya, beberapa orang yang secara finansial lebih mampu tetap dilabeli sebagai penerima bantuan. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya keterbukaan dalam proses validasi dan dominasi data usang yang tidak diperbarui secara berkala. Selain itu, proses pemilihan penerima, yang seharusnya dilakukan melalui pertemuan desa, terkadang tercemari oleh intervensi pihak luar, seperti tekanan sosial dan kepentingan kelompok tertentu, yang mengkompromikan gagasan keadilan kebijakan.

2) Sumber Daya

Implementasi bantuan tunai langsung (BLT) memerlukan dukungan teknis dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, situasi aktual di Desa Moodu menunjukkan kurangnya staf pelaksana. Dengan beban kerja yang berat, program dukungan ini hanya dikelola oleh sembilan pejabat pemerintah daerah. Selain itu, seluruh proses dari pengumpulan data hingga distribusi tetap dilakukan secara manual karena tidak adanya fasilitas pendukung seperti alat digitalisasi. Hal ini meningkatkan kemungkinan kesalahan teknis seperti duplikasi data, pemalsuan, atau keterlambatan penyebaran. Kelancaran operasional program terhambat oleh ketidakmampuan petugas dalam menjalankan tugas mereka karena kurangnya pelatihan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi, ketersediaan sumber daya yang terbatas ini perlu dipertimbangkan dengan cermat.

3) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Kecamatan dan Badan Pelayanan Sosial, di antara entitas pelaksana lainnya, terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara sektoral dan kurang terintegrasi. Akibatnya, masyarakat menerima informasi yang tidak konsisten. Karena pengumuman yang mendadak atau kurangnya komunikasi, banyak pemilik rumah tidak mengetahui jadwal distribusi yang tepat. Akibatnya, antrean sering terbentuk selama distribusi, dan miskomunikasi bahkan dapat menyebabkan perselisihan antar pemilik rumah. Tantangan tambahan meliputi penggunaan teknologi informasi yang tidak memadai dan tidak adanya jalur komunikasi formal. Masyarakat secara keseluruhan tidak dapat dijangkau hanya dengan komunikasi yang menggunakan pengeras suara masjid dan perkumpulan warga

(RT/RW). Untuk menjamin pelaksanaan program yang tertib dan efektif, diperlukan struktur komunikasi yang sistematis dan terintegrasi baik secara horizontal (antar instansi daerah) maupun vertikal (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah).

#### 4) Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksana di lapangan. Para pejabat desa di Desa Moodu telah melakukan yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan prosedur operasional normal. Meskipun demikian, beberapa pelaksana masih kurang memahami secara teknis protokol distribusi bantuan. Kerumunan dan prosedur yang berlarut-larut adalah akibatnya. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar pelaksana menunjukkan tingkat dedikasi yang tinggi, kompetensi telah stagnan karena kurangnya pengawasan dan pelatihan atau pembinaan rutin. Penilaian kinerja rutin belum tercakup dalam sistem pemantauan internal yang ada. Hal ini dapat menurunkan standar pelayanan publik dan membahayakan efektivitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaksana masih berupaya untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara efisien meskipun terdapat kesenjangan kapasitas.

#### 5) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Masyarakat Desa Moodu sangat bergantung pada dukungan pemerintah karena kondisi ekonomi mereka, karena sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal. Dalam hal ini, kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan rumah tangga sebagian besar dipenuhi oleh Bantuan Tunai Langsung (BLT). Namun, ketergantungan ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat masih kurang. Lebih jauh lagi, penargetan penerima yang tidak tepat seringkali menyebabkan dinamika sosial seperti kecemburuan antar warga. Hal ini melemahkan kekompakan komunitas dan menyebabkan gesekan sosial. Secara politis, meskipun program BLT tidak secara langsung terkait dengan tujuan politik lokal, beberapa warga setempat terus berpikir bahwa kedekatan dengan pejabat menentukan apakah mereka menerima bantuan atau tidak, meskipun tidak ada bukti nyata untuk mendukung teori ini.

#### 6) Sikap Para Pelaksana

Para pelaksana di Desa Moodu umumnya dianggap memiliki sikap positif. Mereka menunjukkan transparansi dan kesiapan untuk menanggapi keluhan dari masyarakat. Selain itu, mereka bereaksi cepat terhadap masalah-masalah baru. Namun, kemungkinan kesalahan administratif tetap ada karena tidak adanya mekanisme evaluasi dan pembinaan yang teratur. Tanpa struktur kerja yang profesional dan terukur, sikap yang baik saja tidak cukup. Langkah-langkah pengendalian sosial yang lebih kuat juga diperlukan untuk

menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan, meskipun beberapa pejabat telah menunjukkan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama agar para pelaksana dapat bekerja dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai di samping pengalaman.

## **Pembahasan**

Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) di Kelurahan Moodu menunjukkan bagaimana kompleksitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal seringkali dipengaruhi oleh enam indikator dari teori Van Meter dan Van Horn.

### **a) Standar dan Sasaran Kebijakan**

Indikator paling awal dan terpenting dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah standar dan target kebijakan. Pemerintah pusat telah mengembangkan tujuan dan sasaran kebijakan Bantuan Tunai Langsung (BLT) secara normatif melalui pedoman dan peraturan teknis berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Moodu. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya berhasil dalam praktiknya. Penargetan penerima BLT ternyata tidak akurat; beberapa orang yang cukup kaya masih terdaftar sebagai penerima, sementara yang lain yang lebih membutuhkan justru tidak terdaftar.

Masalah ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerjemahan norma kebijakan di tingkat implementasi. Salah satu penyebab utama kurangnya keberhasilan kebijakan BLT dalam mengurangi kemiskinan adalah perbedaan antara data penerima manfaat dan situasi nyata masyarakat setempat. Hal ini mendukung gagasan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa standar dan tujuan kebijakan yang ambigu atau kontradiktif akan menyebabkan distorsi implementasi.

Oleh karena itu, meskipun kebijakan BLT di Desa Moodu memiliki tujuan yang jelas untuk membantu kaum miskin, implementasinya masih perlu ditingkatkan dalam hal penyempurnaan kriteria dan pembaruan data untuk menjamin bahwa tujuan kebijakan tersebut benar-benar tepat.

Hal ini konsisten dengan penelitiannya (Dinanti, 2019), yang menjelaskan standar dan tujuan kebijakan serta menyoroti standar dan tujuan spesifik yang harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan evaluasi sejauh mana tujuan dan standar tersebut terpenuhi. Undang-Undang Perubahan Desa Nomor 06 Tahun 2020 dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 sejalan dengan standar dan tujuan kebijakan pemerintah desa.

b) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sejumlah sumber daya, termasuk informasi, fasilitas dan infrastruktur, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia. Bahkan kebijakan yang kuat pun akan sulit dilaksanakan dengan sukses tanpa bantuan sumber daya yang memadai.

Menurut temuan penelitian, implementasi Bantuan Tunai Langsung (BLT) di Desa Moodu masih terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia. Beban yang ditanggung relatif tinggi karena tidak banyak otoritas lokal yang terlibat dalam pengumpulan data, verifikasi, dan distribusi BLT. Hal ini menyebabkan validasi dan verifikasi data penerima yang kurang ideal.

Selain itu, penanganan data sebagian besar masih dilakukan secara manual karena kurangnya infrastruktur dan kemampuan, terutama dalam sistem pengumpulan data berbasis TI. Hal ini meningkatkan kemungkinan adanya penerima data ganda, keterlambatan perubahan data, dan kesalahan administrasi.

Pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan tunai langsung, tetapi distribusinya belum dioptimalkan karena kelangkaan sumber daya pendukung tambahan. Hasil ini memvalidasi hipotesis yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai.

Sedangkan menurut penelitiannya (Dinanti, 2019), bahwa salah satu elemen yang dibutuhkan untuk proses implementasi adalah komponen sumber daya ini. Sumber daya yang paling berharga adalah manusia. Agar suatu program dapat diimplementasikan dengan sukses, sumber daya baik finansial maupun manusia harus tersedia. Aparat Desa (Bagian Keuangan) bertanggung jawab untuk mengorganisir distribusi program BLT, satu orang BABINSA bertugas sebagai petugas keamanan selama distribusi program, dan tiga orang (kepala dusun dan RT/RW) bertugas untuk mensosialisasikan program dan mengumpulkan informasi tentang calon penerima BLT. Sumber daya manusia ini cukup dan mampu untuk melaksanakan program BLT. Ketersediaan dana, khususnya anggaran bulanan sebesar \$300.000. Pembayaran tunai tidak dikurangi. Namun, ada masalah dengan waktu penyediaan BLT, menurut pernyataan sejumlah warga Desa Mojorejo yang menerima BLT. Mereka mengklaim bahwa ada keterlambatan bulanan dalam penyediaan tersebut, yang berarti tidak dilaksanakan tepat waktu.

c) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi antar organisasi menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dipahami dan dilaksanakan secara seragam oleh seluruh pihak yang terlibat. Implementasi BLT melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelurahan, hingga masyarakat penerima bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antara pemerintah kelurahan dengan instansi terkait sudah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi, baik terkait perubahan kebijakan, jadwal penyaluran, maupun mekanisme teknis BLT. Akibatnya, sebagian masyarakat penerima bantuan kurang memahami prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan.

Menurut penelitiannya (Dinanti, 2019) Pelaksanaan program kebijakan bergantung pada koordinasi yang efektif, bantuan komunikasi, dan komunikasi antar organisasi yang terkait. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama kelembagaan diperlukan agar rencana kebijakan berhasil. Kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan rencananya sesuai dengan tujuan dan sasarannya bergantung pada komunikasi yang efektif. Dengan adanya komunikasi antara lembaga pelaksana dan kelompok terkait, pelaksanaan program BLT di Dusun Mojorejo dianggap berjalan cukup baik. Bapak Nunung, Kepala Desa Mojorejo, menyatakan bahwa pemerintah mengadakan pertemuan koordinasi dengan petugas pelaksana program BLT sebelum program tersebut dilaksanakan untuk merencanakan sosialisasi dan mengantisipasi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup kompetensi, profesionalisme, integritas, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Agen pelaksana BLT di Kelurahan Moodu terdiri dari aparat kelurahan yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum aparat kelurahan memiliki komitmen untuk melaksanakan BLT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, keterbatasan pemahaman teknis dan beban kerja yang tinggi menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Dalam beberapa kasus, proses pendataan dan penyaluran masih dilakukan secara administratif tanpa analisis mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

e) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Keefektifan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Moodu, di mana mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dan memiliki penghasilan yang tidak tetap, menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan yang signifikan akan bantuan tunai langsung (BLT). BLT merupakan program yang banyak dinantikan karena kondisi tersebut.

Dari sisi sosial, adanya kedekatan sosial dan hubungan kekeluargaan yang kuat di lingkungan masyarakat turut mempengaruhi persepsi terhadap penyaluran BLT. Ketika terdapat warga yang tidak menerima bantuan, muncul kecemburuan sosial yang dapat memicu konflik horizontal.

Sementara itu, faktor politik juga berpotensi mempengaruhi implementasi BLT, terutama jika bantuan sosial dipersepsikan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik. Meskipun tidak ditemukan bukti dominan terkait politisasi BLT di Kelurahan Moodu, potensi tersebut tetap perlu diantisipasi melalui sistem pengawasan yang transparan.

f) Sikap Para Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, aparat kelurahan pada umumnya memiliki sikap yang cukup positif terhadap kebijakan BLT dan menyadari pentingnya bantuan tersebut bagi masyarakat miskin. Namun, keterbatasan sumber daya dan tekanan administratif terkadang mempengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan.

Sikap pelaksana yang cenderung patuh pada prosedur administratif tanpa diimbangi dengan kepekaan sosial dapat mengurangi efektivitas BLT dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan agar pelaksana tidak hanya menjalankan kebijakan secara formal, tetapi juga memahami substansi dan tujuan kebijakan secara mendalam.

Menurut penelitiannya (Dinanti, 2019) Preferensi nilai para pelaksana tercermin dalam pemahaman mereka terhadap suatu kebijakan dan intensitas sikap mereka. Para pelaksana program BLT di Desa Mojorejo telah memenuhi tanggung jawab, cita-cita, dan peran masing-masing. Pemerintah memprioritaskan kepentingan masyarakat khususnya kaum miskin dalam melaksanakan program BLT, dan para pelaksana juga memberikan instruksi khusus kepada penerima untuk menjamin bahwa pembayaran mereka digunakan dengan benar.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari penelitian dan diskusi mengenai implementasi kebijakan Bantuan Tunai Langsung (BLT) untuk pengentasan kemiskinan di Desa Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, jelas bahwa kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kesulitan. Meskipun program ini telah berjalan dari tahun 2020 hingga 2024, masalah-masalah berikut telah menghambat efektivitasnya untuk mencapai potensi penuh: 1) Standar dan Sasaran Kebijakan belum sepenuhnya tepat karena basis data penerima yang digunakan tidak diperbarui secara berkala, sehingga masih terdapat penerima yang tidak sesuai dengan kriteria dan warga miskin yang layak justru tidak terakomodir. 2) Sumber Daya yang tersedia, baik dari segi jumlah tenaga pelaksana maupun infrastruktur pendukung, masih sangat terbatas, yang mengakibatkan proses validasi, verifikasi, dan penyaluran bantuan tidak berjalan dengan optimal. 3) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas kurang efektif. Koordinasi yang lemah dan kurangnya informasi kepada masyarakat menyebabkan kebingungan dan ketidaktertiban dalam pelaksanaan program. 4) Karakteristik Agen Pelaksana menunjukkan bahwa masih terdapat petugas yang belum memahami secara menyeluruh prosedur dan mekanisme penyaluran BLT, yang berdampak pada kurangnya profesionalitas dalam pelaksanaan program. 5) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik masyarakat Kelurahan Moodu yang mayoritas berada di sektor informal menambah tantangan dalam menjamin efektivitas program. Di sisi lain, terdapat indikasi adanya persepsi publik terhadap unsur kepentingan dalam penentuan penerima bantuan. 6) Sikap Para Pelaksana cukup baik dan menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas. Namun, tanpa adanya pembinaan dan pengawasan berkala, potensi kesalahan administrasi dan ketidaktepatan distribusi tetap bisa terjadi.

Secara umum, implementasi kebijakan BLT di Kelurahan Moodu memiliki peran dalam membantu masyarakat miskin. Namun, masih dibutuhkan perbaikan signifikan agar program ini benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Pemerintah Kelurahan Moodu dan Dinas Sosial Kota Gorontalo perlu melakukan pembaruan data penerima BLT secara berkala dan menyeluruh agar program bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari kecemburuan sosial di masyarakat. 2) Peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan, baik melalui penambahan tenaga pelaksana maupun pelatihan yang berkesinambungan agar pelaksana memiliki pemahaman yang baik terhadap

mekanisme kebijakan. 3) Meningkatkan sistem komunikasi antar lembaga dan dengan masyarakat melalui pengumuman yang jelas, sistem digital, dan sosialisasi rutin agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan tertib dan informasi dapat diterima oleh semua pihak. 4) Pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap pelaksanaan program perlu diterapkan agar tidak ada penyimpangan dalam distribusi bantuan. Pengawasan ini juga harus melibatkan masyarakat agar tercipta kontrol sosial yang efektif. 5) Perlu adanya reformasi dalam sistem penyaluran bantuan, seperti penggunaan sistem non-tunai berbasis digital, untuk menghindari kerumunan dan mempercepat distribusi bantuan secara akurat dan aman. 6) Pemerintah perlu mendorong program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, D. H. Z. (2021). Kebijakan publik berbasis kearifan lokal. Penerbit Yayasan Barcode.
- Azizah, K. N., Nuzuli, A. K., & Oktaviana, W. (2023). Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin di Nagari Batang Arah Tapan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 241-245. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.154>
- Cui, Z., Li, E., Li, Y., Deng, Q., & Shahtahmassebi, A. R. (2023). The impact of poverty alleviation policies on rural economic resilience in impoverished areas: A case study of Lankao County, China. *Journal of Rural Studies*, 99(April 2022), 92-106. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.03.007>
- Dinanti, E. S. (2019). Pelaksanaan program bantuan langsung COVID-19 di Desa Mojorejo Kecamatan Modo.
- Lestari, W. D., & Area, U. M. (2023). Implementasi kebijakan peraturan pangulu langsung tunai di Desa Saran Skripsi Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan II.
- Nani, Y. N., Rustam, T., & Tui, F. P. (2024). Kebijakan publik dalam perspektif dalam pembangunan rumah layak huni. Penerbit Tahta Media, 1, 1-88.
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204-1224. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>
- Oktaviana, B. K., Kaku, J., & Abdussamad, F. P. T. (2023). Implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan non tunai di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 2, 1-11. <https://doi.org/10.59713/jipik.v2i1.306>
- Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik. Penerbit Alfabeta.

- Prawoto, N., & Selatan, J. L. (2009). Memahami kemiskinan dan mengatasi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1-15.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta.
- Suharto, E. (2008). Islam dan negara kesejahteraan. *Program*, 1-12. <https://doi.org/10.1051/matecconf/20166600022>
- Suharto, E. (2009). Menengok kriteria kemiskinan di Indonesia: Menimbang indikator kemiskinan berbasis hak. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(2), 31-39.
- Tahir, A. (2020). *Kebijakan publik & transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Alfabeta, CV.